



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2026**

SERI F NOMOR 1146

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 18 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN
HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang penetapan besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk 128 desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 40 Seri D Nomor 44);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 1 Seri A Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 2 Seri F Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah yang bersumber dari APBD dan/atau APBDes serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk 128 desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

- (1) Besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- (2) Sumber data dalam penghitungan pengalokasian besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
- (3) Rincian bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah setiap desa paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan alokasi dana desa, bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi tahap I tahun berjalan dari kepala desa.
- (5) Bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah yang diterima desa tahun anggaran 2026 dianggarkan dalam APBDes.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dikelola menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Penggunaan bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah dikelola sesuai dengan ketentuan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi, bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah setiap tahap dari RKUD ke RKD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Penetapan besaran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah untuk 128 desa di Kabupaten Samosir tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

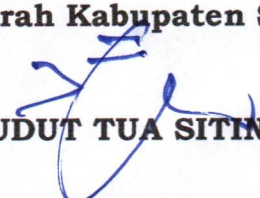
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 20 Tahun 2026

Seri F Nomor 1146

Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TANGGAL : 24 APRIL 2026
TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA
SE- KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN/DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SIMANINDO				
1	AMBARITA	47.162.770	23.305.190	70.467.960
2	CINTA DAME	58.151.465	18.999.768	77.151.233
3	DOSROHA	60.380.995	18.999.768	79.380.763
4	GAROGA	52.090.893	18.999.768	71.090.661
5	HUTA GINJANG	31.743.929	17.340.399	49.084.328
6	MADUMA	30.906.914	17.340.399	48.247.313
7	MARTOBA	53.516.581	18.999.768	72.516.349
8	PARBALOHAN	31.431.759	17.340.399	48.772.158
9	PARDOMUAN	31.574.851	17.340.399	48.915.250
10	PARMONANGAN	32.675.300	17.340.399	50.015.699
11	SIMANINDO SANGKAL	50.005.228	18.999.768	69.004.996
12	SIHUSAPI	31.183.358	17.340.399	48.523.757
13	SIMARMATA	320.930.328	17.340.399	338.270.727
14	TANJUNGAN	36.001.079	22.031.221	58.032.300
15	TOMOK	90.352.063	32.164.565	122.516.628
16	UNJUR	68.577.986	18.999.768	87.577.754
17	SIALLAGAN PINDARAYA	64.646.795	22.468.777	87.115.572
18	MARLUMBA	35.420.809	18.999.767	54.420.576
19	SIMANINDO	45.936.438	18.999.767	64.936.205
20	TOMOK PARSAORAN	52.242.556	18.999.768	71.242.324
ONAN RUNGGU				
21	HARIAN	31.345.573	17.340.399	48.685.972
22	HUTA HOTANG	32.260.802	23.295.129	55.555.931
23	JANJI MATOGU	31.034.214	17.340.399	48.374.613
24	ONAN RUNGGU	34.830.570	22.061.818	56.892.388
25	PAKPAHAN	31.128.623	17.340.399	48.469.022
26	PARDOMUAN	30.919.343	17.340.399	48.259.742
27	RINABOLAK	30.932.280	17.340.399	48.272.679
28	SILIMA LOMBU	33.542.963	17.340.399	50.883.362
29	SIPIRA	33.639.491	17.340.399	50.979.890
30	SITAMIANG	30.774.039	17.340.399	48.114.438
31	SITINJAK	31.248.602	17.340.399	48.589.001
32	TAMBUN SUNGKEAN	30.603.070	17.340.399	47.943.469
NAINGGOLAN				
33	HUTA RIHIT	30.746.456	17.340.399	48.086.855
34	NAINGGOLAN	33.888.596	26.200.926	60.089.522

NO	KECAMATAN/DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	PANANGGANGAN	30.801.308	17.340.399	48.141.707
36	PANGALOAN	31.169.475	17.340.399	48.509.874
37	PASARAN I	30.795.187	17.340.399	48.135.586
38	PASARAN PARSAORAN	32.626.166	17.340.399	49.966.565
39	SIBONOR OMPU RATUS	31.390.802	17.340.399	48.731.201
40	SINAGA URUK PANDIANGAN	31.226.125	17.340.399	48.566.524
41	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	30.403.965	17.340.399	47.744.364
42	TOGUAN GALUNG	31.240.816	17.340.399	48.581.215
43	JANJIMARAPOT	30.674.783	17.340.399	48.015.182
44	PANANGGANGAN II	30.837.870	17.340.399	48.178.269
45	SIPINGGAN	31.812.351	17.340.399	49.152.750
PALIPI				
46	GORAT PARLOMBUAN	31.248.831	23.384.057	54.632.888
47	HATOGUAN	36.151.556	17.340.399	53.491.955
48	HUTA GINJANG	31.020.542	17.340.399	48.360.941
49	PALIPI	35.447.323	17.340.399	52.787.722
50	PARDOMUAN NAULI	30.307.665	17.340.399	47.648.064
51	PARSAORAN URAT	30.928.613	17.340.399	48.269.012
52	SAOR NAULI HATOGUAN	30.955.187	17.340.399	48.295.586
53	SIGAOL MARBUN	31.750.579	17.340.399	49.090.978
54	SIGAOL SIMBOLON	35.095.077	17.340.399	52.435.476
55	SIMBOLON PURBA	31.534.165	17.340.399	48.874.564
56	SUHUT NIHUTA PARDOMUAN	30.628.582	17.340.399	47.968.981
57	URAT II	31.177.470	17.340.399	48.517.869
58	URAT TIMUR	30.889.792	17.340.399	48.230.191
59	PARLOMBUAN	31.161.804	17.340.399	48.502.203
60	HUTA DAME	30.609.353	17.340.399	47.949.752
61	SIDEAK	31.004.305	17.340.399	48.344.704
62	PAMUTARAN	30.477.407	17.340.399	47.817.806
HARIAN				
63	DOLOK RAJA	40.156.503	17.340.399	57.496.902
64	HARIARA POHAN	63.045.273	18.999.768	82.045.041
65	JANJI MARTAHAN	100.741.241	25.053.077	125.794.318
66	PARTUNGKOT NAGINJANG	33.411.282	305.457.225	338.868.507
67	SAMPUR TOBA	40.523.062	17.340.399	57.863.461
68	SIPARMAHAN	30.725.465	17.340.399	48.065.864
69	SOSOR DOLOK	30.840.575	53.181.941	84.022.516
70	TURPUK LIMBONG	41.212.939	21.816.645	63.029.584
71	TURPUK MALAU	40.830.937	18.999.767	59.830.704
72	TURPUK SAGALA	40.266.345	18.999.767	59.266.112
73	TURPUK SIHOTANG	106.426.300	18.999.768	125.426.068
74	HARIARA PINTU	31.579.353	17.340.399	48.919.752
75	HUTAGALUNG	32.628.711	17.340.399	49.969.110
SIANJUR MULA-MULA				
76	AEK SIPITU DAI	41.667.184	21.806.942	63.474.126
77	BOHO	30.891.984	18.999.767	49.891.751
78	BONAN DOLOK	30.638.191	17.340.399	47.978.590
79	GINOLAT	30.566.480	18.999.767	49.566.247
80	HASINGGAAN	30.849.830	17.340.399	48.190.229

NO	KECAMATAN/DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81	HUTA GINJANG	30.813.777	17.340.399	48.154.176
82	HUTA GUR-GUR	30.702.049	17.340.399	48.042.448
83	SARI MARRIHIT	31.263.026	25.860.891	57.123.917
84	SIANJUR MULA-MULA	31.183.431	18.999.767	50.183.198
85	SIBORO	30.837.461	18.999.767	49.837.228
86	SINGKAM	30.515.441	17.340.399	47.855.840
87	HABEAHAN NABURAHAN	30.574.540	18.999.767	49.574.307
RONGGUR NIHUTA				
88	LINTONG NIHUTA	30.790.138	17.340.399	48.130.537
89	PARADUAN	31.017.295	17.340.399	48.357.694
90	RONGGUR NIHUTA	32.941.958	17.340.399	50.282.357
91	SABUNGAN NIHUTA	31.313.817	17.340.399	48.654.216
92	SALAON DOLOK	31.380.947	17.340.399	48.721.346
93	SALAON TOBA	31.746.396	17.340.399	49.086.795
94	SALAON TONGA-TONGA	31.221.880	17.340.399	48.562.279
95	SIJAMBUR	31.534.116	17.340.399	48.874.515
PANGURURAN				
96	AEK NAULI	31.360.989	17.340.399	48.701.388
97	HUTA BOLON	43.852.165	28.210.411	72.062.576
98	HUTA TINGGI	31.908.676	17.340.399	49.249.075
99	HUTA NAMORA	71.175.245	18.999.768	90.175.013
100	LUMBAN PINGGOL	33.046.465	17.340.399	50.386.864
101	LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK	31.329.268	17.340.399	48.669.667
102	LUMBAN SUHI-SUHI TORUAN	41.944.094	18.999.768	60.943.862
103	PANAMPANGAN	46.992.700	18.999.767	65.992.467
104	PARBABA DOLOK	34.550.842	17.340.399	51.891.241
105	PARDOMUAN I	136.597.924	248.932.939	385.530.863
106	PARDOMUAN NAULI	30.789.706	17.340.399	48.130.105
107	PARDUGUL	34.556.850	18.999.767	53.556.617
108	PARHORASAN	30.804.788	17.340.399	48.145.187
109	PARLONDUT	32.852.856	18.999.767	51.852.623
110	PARMONANGAN	31.224.282	17.340.399	48.564.681
111	PARSAORAN I	56.761.972	18.999.768	75.761.740
112	RIANATE	32.575.754	18.999.767	51.575.521
113	SAIT NIHUTA	43.898.652	18.999.767	62.898.419
114	SIALANGUAN	36.294.425	18.999.767	55.294.192
115	SIANTING-ANTING	34.232.441	18.999.767	53.232.208
116	SINABULAN	31.097.332	17.340.399	48.437.731
117	SIOPAT SOSOR	129.401.469	18.999.768	148.401.237
118	SITOLU HUTA	32.301.475	18.999.767	51.301.242
119	SITUNGKIR	41.495.952	19.031.797	60.527.749
120	TANJUNG BUNGA	41.553.448	18.999.767	60.553.215
SITITIO				
121	BUNTU MAULI	31.234.417	17.340.399	48.574.816
122	CINTA MAJU	30.892.287	17.340.399	48.232.686
123	HOLBUNG	30.737.075	17.340.399	48.077.474
124	JANJI RAJA	30.772.491	17.340.399	48.112.890
125	SABULAN	31.890.934	17.340.399	49.231.333
126	TAMBA DOLOK	30.698.423	17.340.399	48.038.822

NO	KECAMATAN/DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
127	PARSAORAN	30.616.816	17.340.399	47.957.215
128	JANJI MARIA	30.395.123	17.340.399	47.735.522
JUMLAH		5.209.869.081	2.920.488.261	8.130.357.342

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 20 Tahun 2026
Seri F Nomor 1146
Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK